PERAN KAPITAL SOSIAL DALAM PENGUATAN KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT

(Studi Kasus di Sulawesi Tengah)

Suradi

ABSTRAK

Kapital sosial dan ketahanan sosial masyarakat adalah dua konsep dan realitas yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan masyarakat. Kapital sosial wujud dalam keperangkatan, kepranataan dan nilai-nilai sosial di masayakat, yang merupakan sumber daya bagi pembangunan masyarakat.

Hasil penelitian di Sulawesi Tengah ini menunjukkan, bahwa kapital sosial telah berperan dalam penguatan ketahanan sosial masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan sosial dasar, mengatasi masalah sosial dan memperkuat hubungan-hubungan sosial. Namun demikian peran kapital sosial tersebut masih sangat terbatas, baik jangkauan maupun skala kegiatannya. Hal ini disebabkan karena mereka belum membangun jejaring kerja secara sinergis dalam kelembagaan satu dengan lainnya.

Melihat prospek kapital sosial dalam penguatan ketahanan sosial masyarakat, maka diperlukan intervensi dari Dinas Sosial, sehingga ke depan kapital sosial dapat melaksanakan perannya lebih bermakna dalam proses pembangunan masyarakat.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan sosial dewasa ini menuntut peran aktif masyarakat pada semua lapisan. Tuntutan akan peran aktif masyarakat ini, tidak saja sebagai dinamika masyarakat *(internal factor)* yang terus menerus berubah; tetapi juga dipengaruh oleh perkembangan politik pembangunan di tingkat global *(external factor)*. Di dalam politik pembangunan global dewasa ini, ada tuntutan bahwa setiap kebijakan pembangunan perlu mengakomodasi persoalan demokratisasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender dan *civil society*. Pergeseran pendekatan pembangunan ini sebagai respon atas kelemahan pendekatan pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi. Pada kenyataannya ukuran-ukuran ekonomi dari aktivitas pembangunan, tidak dapat menjelaskan secara detail terjadinya kemiskinan, ketimpangan pembagian pendapatan dan pengangguran di berbagai belahan dunia (Jameson W. and Blue, 1974).

Ukuran-ukuran ekonomi dalam pembangunan telah menciptakan ketergantungan masyarakat yang semakin kuat kepada pemerintah. Sebaliknya peran serta masyarakat dalam aktivitas pembangunan semakin tidak kentara tanpa adanya input-input dari pemerintah (Soetrisno, 1995). Rendahnya peran serta masyarakat ini meluas ke berbagai bidang pembangunan, baik ekonomi, sosial budaya, politik, hukum dan pertahanan keamanan. Konflik yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia dalam lima tahun terakhir ini, merupakan contoh lemahnya peran serta masyarakat dalam bidang sosial budaya, hukum, politik dan pertahanan keamanan (Mu'man, 2003; Syarif Ibrahim, 1999). Kemudian terjadinya kemiskinan, busung lapar, dan epidemi berbagai penyakit (diare, deman berdarah, polio dan lain-lain), merupakan fenomena lain yang melengkapi lemahnya peran serta masyarakat dalam pembangunan sosial (Suradi, tanpa tahun).

Sebenarnya konflik antar kelompok, kemiskinan dan keterlantaran anak yang meningkat tajam sejak pertengahan tahun 90-an dapat dicegah, apabila masyarakat memiliki ketahanan sosial yang kuat. Ketahanan sosial masyarakat akan terwujud apabila masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama atau sebagai subyek dalam pembangunan.

Pada era reformasi, menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama atau dalam konsep *people centered development* menjadi salah satu isu dalam politik pembangunan. Namun demikian, sampai dengan saat ini

peran pemerintah masih terasa lebih besar dibandingkan peran masyarakat. Dikemukakan oleh Gidden (1999), bahwa isunya bukan peran pemerintah yang lebih besar atau lebih kecil, tetapi pangakuan bahwa pemerintah harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru abad global, dan bahwa otoritas, termasuk legitimasi negara, harus diperbarui secara aktif. Ditambahkan oleh Bowman dan Hamton, bahwa munculnya tuntutan debirokratisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, devolusi dan privatisasi, menurutnya disebabkan ketidak-pedulian pemerintah pusat untuk melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan pembangunan sampai ke daerah (Tjahya Supriyatna, 1997).

Para ahli sosial maupun ekonomi seperti The Kian Wie (1980) dan Bintoro (1988) banyak menulis atau mengkoreksi pendekatan pembangunan di negeri ini. Bahwa pendekatan pembangunan yang sentralisitis tidak mampu menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi. Aktivitas pembangunan seperti ini pada kenyatannya tidak mengembangkan keswadayaan dan keswakaryaan masyarakat lokal. Selain itu, pendekatan tersebut kurang mengembangkan peran serta dan daya kreativitas masyarakat dalam aktivitas pembangunan. Padahal, Korten (1986) menegaskan, bahwa pembangunan masyarakat akan efektif apabila dilaksanakan dengan memanfaatkan organisasi yang ada di tingkat lokal. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah tidak melakukan intervensi terlalu jauh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sebaliknya, pemerintah menempatkan diri dan berperan sebagai regulator, fasilitator dan motivator.

Pada masyarakat Indonesia, baik di perkotaan maupun di perdesaan, ada sebuah mekanisme pemecahan masalah oleh masyarakat secara turun temurun. Mekanisme tersebut dapat ditemukan di dalam keperangkatan, kepranataan dan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat lokal. Sebagian dari keperangkatan dan kepranataan sosial tersebut tumbuh dari masyarakat yang dilandasi oleh nilai dan adat istiadat. Sedangkan sebagian yang lain sengaja ditumbuhkan oleh masyarakat sebagai wahana untuk menjawab berbagai macam kebutuhan sejalan dengan tperkembangan masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari, keperangkatan sosial tersebut lebih dikenal dengan kelompok arisan, simpan pinjam, serikat tolong menolong, tetulung layat, kelompok jema'at, ta'lim dan lain sebagainya. Kemudian kepranataan dapat dilihat pada upacara-upacara di sekitar kerumah tanggaan seperti perkawinan, kelahiran, kematian dan sebagainya. Keduanya kemudian diperkuat dengan nilai-nilai sosial dan kearifan lokal yang sudah melembaga dengan baik seperti nilai kebersamaan, toleransi, kesamaan hak dan keterbukaan. Antara keperangkatan, kepranataan dan nilai-nilai sosial tersebut dalam masyarakat tertentu mampu membentuk jaringan yang sinergis sebagai wahana pembangunan masyarakat (Markus, 2002).

Keperangkatan, kepranataan dan nilai-nilai sosial tersebut tercakup di dalam konsep kapital sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Putman (1995), bahwa kapital sosial menunjuk pada bagian-bagian dari organisasi sosial seperti kepercayaan, norma dan jaringan, yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan-tindakan yang terkoordinasi. Selanjutnya menurut Grootaert (Lawang, 2005) untuk kapital sosial menunjuk pada institusi, hubungan, sikap dan nilai yang membimbing interaksi di antara manusia dan memberikan kontribusi pada perkembangan ekonomi dan sosial.

Kapital sosial berperan besar dalam kehidupan masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Requena (see : www.en.wikipedia.org/wiki social_capital;) bahwa kapital sosial membawa beberapa konsep sosiologi yang penting seperti dukungan sosial, integrasi dan kohesi sosial. Pandangan ini didukung oleh Rothstein (en.wikipedia.org/wiki/ Sosial_capital), yang menegaskan bahwa kekuatan nyata teori kapital sosial adalah kemampuannya mengkombinasikan antara struktur historis sosiologi makro dengan mekanisme sebab akibat pada tingkat mikro, yang merupakan suatu keistimewaan dalam ilmu sosial.

Kemudian kapital sosial menurut Fukuyama dan Kenworthy (see : www.en.wikipedia.org/wiki/social_capital), penting untuk mengefisienkan fungsi pada ekonomi modern, dan mewujudkan demokrasi liberal yang stabil. Brown, Ashman dan Lyon (see : www.en.wikipedia.org/wiki/social_capital), menambahkan, bahwa kapital sosial sebagai

sesuatu yang penting untuk membangun kerja sama lintas sektor dengan berbagai pihak, penting untuk menghasilkan berbagai kerja sama dan dalam mempertajam pola-pola pembangunan regional. Ditambahkan pula oleh Narayan dan Cassidy (see : www.en.wikipedia.org/wiki/social_capital), bahwa kapital sosial jelas-jelas penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Optimisme, kepuasan hidup, persepsi terhadap lembaga pemerintahan dan lingkungan politik semuanya dari dimensi yang fundamnetal dari kapital sosial (see : www.en.wikipedia.org/wiki/social_capital).

Perhatian terhadap kapital sosial telah menjadi gerakan global. Nicole (2001) mengutip dokumen *Agenda 21* hasil Konperensi PBB di Rio de Janeiro tahun 1992, dalam dokumen tersebut secara resmi mengakui pentingnya tingkat lokal dan organisasi-organisasinya, dengan konsep *"Think Globaly, Act Localy"*. Dokumen ini menjadi dasar moral paradigma baru pembangunan yang membuka peluang bagi organisasi swadaya *(self-help organization)* untuk memberikan kontribusi yang lebih bermakna dalam pembangunan. Paradigma baru dalam pembangunan ini mengakui, bahwa masyarakat lokal memiliki pengetahuan dan kapabilitas untuk mengorganisasikan diri (dalam organisasi swadaya) guna memecahkan masalah mereka. Disamping itu, organisasi lokal atau organisasi swadaya mampu menjembatani keberlanjutan dan pembangunan partisipatif.

Dalam konteks Indonesia, pemberian ruang yang bebas terhadap kapital sosial sebagai wahana partisipasi masyarakat ini, sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, dimana setiap Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk mengelola berbagai potensi dan kapital yang dikuasai, baik ekonomi maupun sosial dalam aktivitas pembangunan. Dalam kaitan ini, birokrasi di tingkat Kabupaten/Kota hendaknya memiliki kesadaran, bahwa pada tingkat lokal ada kapital sosial. Apabila kapital sosial ini dapat diberdayakan secara optimal akan menjadi modal utama dalam penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Dalam pemahaman umum ketahanan sosial masyarakat dapat dipahami sebagai kemampuan masyarakat untuk menyelesaiakan berbagai persoalan yang dihadapinya. Sedangkan pengertian yang lebih lengkap adalah suatu kondisi kehidupan dinamis masyarakat yang ditandai oleh terpenuhinya hak dan kebutuhan dasar, optimalnya pelaksanaan peranan dan tugas-tugas kehidupan pada setiap individu maupun kelompok, serta terselesaikannya masalah sosial melalui gerakan sosial yang dilandasi oleh nilai kebersamaan dan kesetiakawanan sosial (Einsadt dalam Soetarso, 1991; Suradi, 2005).

Dalam pengertian ketahanan sosial masyarakat tersebut tercakup dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan, yaitu dimensi ekonomi dan dimensi sosial. Jadi tidak mungkin ada ketahanan sosial tanpa ketahanan ekonomi, dan begitu sebaliknya tidak ada ketahanan ekonomi tanpa ketahanan sosial. Pengertian tersebut di atas juga mencakup aspek perilaku sosial masyarakat dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan, yang keduanya juga tidak bisa dipisahkan. Dengan demikian, suatu masyarakat dapat dikatakan memiliki ketahanan sosial apabila ada sinkronisasi antara perilaku sosial dengan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat tersebut. Dalam hal ini nilai-nilai sosial berfungsi, *pertama*, sebagai landasan bagi masyarakat untuk berperilaku sosial sesuai dengan tugas dan peran sosialnya; *kedua*, nilai-nilai sosial tersebut sebagai *filter* masuknya pengaruh dari luar masyarakat yang mengancam pemenuhan hak dan kebutuhan dasar mereka.

Sementara itu, Pusat Kajian Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, Badan Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat Departemen Sosial RI (Muttaqin, et.all, 2005), mendefinisikan ketahanan sosial masyarakat yang di dalamnya mengandung empat aspek, yaitu (1) perlindungan sosial terhadap kelompok rentan, miskin dan PMKS lainnya, (2) partisipasi dalam organisasi sosial, (3) pengendalian terhadap konflik sosial, dan (4) kearifan lokal dalam memelihara Kapital Alam (SDA) dan Kapital Sosial (SDS). Keempat variabel tersebut menggambarkan kondisi dan perilaku sosial masyarakat, dan juga menjadi indikator dalam upaya mengetahui derajat ketahanan sosial masyarakat.

Berdasarkan latar belakang dan berbagai pemikiran tentang kapital sosial dan ketahanan sosial masyarakat tersebut di atas, penelitian ini dilakukan dalam upaya mengidentifikasi jenis,

aktivitas dan peran kapital sosial dalam penguatan ketahanan sosial masyarakat. Adapun realitas kapital sosial yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu keperangkatan, kepranataan dan nilai sosial lokal. Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat maupun Dinas Sosial di daerah dalam memberdayakan kapital sosial guna penguatan ketahanan sosial masyarakat.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode ini digunakan dalam upaya mendeskripsikan jenis, aktivitas dan peran kapital sosial yang dalam realitasnya (definisi operasional) berupa keperangkatan, kepranataan dan nilai sosial lokal dalam penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini adalah aparat desa, pengelola keperangkatan sosial dan tokoh masyarakat setempat. Sumber data tersebut ditentukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan kedudukan formal, dan pengetahuannya tentang keperangkatan, kepranataan dan nilai-nilai sosial lokal. Berdasarkan pertimbangan tersebut, ditentukan 2 orang aparat desa (kepala/sekretaris desa dan urusan pemerintahan), 5 orang pengelola keperangkatan dan 3 orang tokoh masyarakat (tokoh agama, adat dan sosial masing-masing 1 orang).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah (a) studi dokumentasi terhadap dokumen tertulis, hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan, perundang-undangan dan literatur lainnya yang mendukung tujuan penelitian, (b) wawancara mendalam yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang obyektif dan mendalam tentang profil dan aktivitas keperangkatan pelayanan sosial dalam pembangunan masyarakat lokal.

Data yang telah dikumpulkan diolah berdasarkan kategori data yang telah ditentukan. Kemudian dianalisis dengan teknik analisa kualitatif, yaitu dalam bentuk uraian-uraian sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan, yaitu (1) profil dan jaringan kerja antar keperangkatan sosial yang ada di tingkat lokal, (2) aktivitas ekonomi dan sosial budaya yang dilaksanakan oleh keperangkatan sosial; dan (3) manfaat bagi masyarakat dari aktivitas keperangkatan, kepranataan dan nilai sosial budaya dalam penguatan ketahanan sosial masyarakat.

III. HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Poboya yang mewakili tipe desa perkotaan dan Desa Boya Baliase yang mewakili tipe desa perdesaan. Penentuan dua desa ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang obyektif tentang jenis, aktivitas dan peran kapital sosial dalam penguatan ketahanan sosial di Sulawesi Tengah. Hal ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa secara sosial budaya ada perbedaan antara kondisi kehidupan masyarakat di perkotaan dan masyarakat di perdesaan.

1. Kelurahan Poboya

Secara administratif Kelurahan Poboya adalah termasuk salah satu kelurahan di wilayah Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Kelurahan Poboya memiliki luas wilayah 14.35 Km^2, dengan ketinggian 100 m di atas permukaan laut. Secara topografis terdiri dari dataran 205 ha, pegunungan 465 ha, perbukitan 455 ha dan hutan 310 ha. (Monografi Desa Poboya, 2003).

Selanjutnya jumlah penduduk Kelurahan Poboya berjumlah 374 Kepala Keluarga (KK) atau 1,557 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 794 jiwa dan perempuan sebanyak 763 jiwa. Kemudian berdasarkan tingkat pendidikan, menunjukkan bahwa sebesar 83.12 persen penduduk Kelurahan Poboya berpendidikan SLP ke atas. Sebagian besar (1553 orang) penduduk Kelurahan Poboya beragama Islam, dan sebanyak 4 orang yang beragama Budha. Hal ini terkait dengan tata kehidupan masyarakat sehari-hari yang banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Menurut etnis, sebagian besar adalah etnis Kaili dan sebanyak 0.5 persen etnis Bugis/Makassar. Penduduk yang relatif homogen (masih satu etnis), tentunya akan memperkecil terjadinya konflik kepentingan antara warga masyarakat. Sebagian besar penduduk Kelurahan Poboya adalah petani (340 orang/KK), PNS (40 orang), buruh (75 orang) dan wiraswasta (20 orang) (Podes Kelurahan Paboya, 2003).

Dari aspek sosial budaya, terdapat upacara adat yang masih dipelihara dengan baik oleh penduduk Poboya. Warga masyarakat juga memiliki nilai gotong royong yang masih kuat, saling menghormati dan toleransi antar umat beragama dan etnis. Oleh sebab itu, meskipun di Poso terjadi konflik antar agama dan etnis dengan kekerasan, warga di Kelurahan Poboya (Palu pada umumnya) tidak terpancing dengan kejadian tersebut. .

Disamping masih kuatnya pelembagaan nilai sosial budaya dalam kehidupan sehari-hari, di Kelurahan Poboya juga masih berperannya kelembagaan sosial lokal. Jenis-jenis kelembgaan lokal tersebut, antara lain rukun kematian, jimpitan, pengajian (ta'lim) dan arisan.

2. Desa Boya Baliase

Desa Boya Baliase termasuk salah satu Desa di wilayah Kecamatan Marawola, Kabupaten Doggala. Desa Boya Baliase ini memiliki luas wilayah 37.5 km^2. Secara topografis seluruh wilayah desa terdiri dari dataran seluas 37.5 km.

Penduduk Desa Boya Baliase sebanyak 136 Kepala Keluarga (KK) atau 544 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 268 jiwa dan perempuan sebanyak 276 jiwa. Sebagian besar penduduk Desa Boya Baliase berada pada usia produktif (13 – 40). Dilihat dari aspek pendidikan, sebesar 33.64 persen penduduk Desa Boya Baliase berpendidikan STLP ke atas. Kemudian dilihat dari jenis pekerjaan, sebagian besar penduduk Desa Boya Baliase bekerja sebagai petani (215 orang/KK), PNS (18 orang), pedagang (50 orang) dan wiraswasta (45 orang), karyawan swasta (35 orang) dan tukang (20 orang) (Podes Boya Baliase, 2003). Data ini menunjukkan bahwa dari sebagian besar penduduk Desa Boya Baliase paling banyak menggunakan tenaga fisik.

Seluruh penduduk Desa Boya Baliase beragama Islam. Kemudian menurut etnis, seluruhnya adalah etnis Kaili. Kondisi ini merupakan modal sosial yang baik, karena akan terkait langsung dengan tingkat ketahanan sosial masyarakat. Adanya homogenitas masyarakat dalam hal agama maupun etnis, akan menekan terjadinya konflik sosial dalam masyarakat.

Disamping masih kuatnya pelembagaan nilai sosial budaya dalam kehidupan sehari-hari, di Desa Boya Baliase juga masih berperannya kepranataan sosial. Jenis-jenis kepranatanaan sosial tersebut antara lain, rukun kematian, kelompok wanita tani, kesenian, olah raga, pengajian (ta'lim) dan arisan. Kepranataan sosial ini telah mampu berperan sebagai mekanisme pemecahan masalah yang dihadapi warga masyarakat.

B. Jenis Kapital Sosial

Di dalam penelitian ini kapital sosial dioperasionalkan dalam bentuk keperangkatan, kepranataan dan nilai-nilai sosial yang tumbuh pada masyarakat lokal.

1. Keperangkatan

Kapital sosial dalam bentuk keperangkatan yang ada di Kelurahan Poboya (tipe desa perkotaan) dan Desa Bayo Baliase (tipe desa perdesaan) dapat dibedakan ke dalam beberapa kelompok, yaitu :

a) *Kelompok Keagamaan (Islam)*. Kelompok ini dibentuk dengan tujuan untuk memelihara dan meningkatkan keimanan dan aktivitas keagamaan yang berdampak sosial. Kelompok ini tersebar hampir di semua lingkungan (RW), yang anggotanya terdiri dari bapak-bapak maupun ibu-ibu. Pada umumnya kelompok keagamaan Islam ini melaksanakaan kegiatannya seminggu sekali, yaitu setiap malam jum'at. Pada pertemuan tersebut dilaksanakan pengajian Al-Quran dan ceramah agama. Di dalam kelompok ini, anggota secara berkala memberikan shadaqoh dan infaq, yang selanjutnya disalurkan kepada keluarga miskin, anak yatim dan jompo dalam bentuk bahan makanan. Biasanya pemberian santuan sosial ini diberikan menjelang idul fitri atau Idul Adha.

   Selain ta'lim, termasuk kelompok keagamaan ini, adalah Rukun Kematian. Kelompok ini melaksanakan kegiatan terkait dengan proses pemakaman, mulai dari penggalian kubur, memandikan, mengkafankan, menshalatkan, menguburkan dan membaca tahlil.

b) *Kelompok atau Rukun Lingkungan*. Rukun lingkungan merupakan perkumpulan

warga yang dasar keanggotaannya didasarkan pada domisili di lingkungan tertentu (lingkungan/dusun/RW). Kegiatan dalam kelompok lingkungan ini antara lain arisan. Keanggotaan kelompok lingkungan ini bersifat terbuka, artinya semua warga yang berada di lingkungan tertentu, berhak menjadi anggota atau pengurus kelompok tersebut.

c) *Kelompok Arisan Keluarga*. Kelompok arisan keluarga merupakan perkumpulan yang anggotanya relatif tertutup, atau terbatas bagi mereka yang masih ada hubungan keluarga saja. Kelompok arisan keluarga ini dilaksanakan setiap bulan, dengan mengambil tempat secara bergiliran dari rumah ke rumah. Besarnya uang arisan per orang Rp. 5.000 yang dikembalikan dalam bentuk barang konsumsi, yaitu beras 10 kg, gula 1 kg dan teh 1 bungkus.

d) *Kelompok seni budaya*. Ada beberapa jenis seni budaya yang telah membentuk kelompok, yaitu :

1). Group Rebana. Kelompok seni ini bernuansa Islam yang dikembangkan oleh ibu-ibu dan remaja putri. Kesenian ini biasanya ditampilkan pada acara peringatan hari besar Islam.

2). Group Tarian Tradisional Balia, Pamonte dan Jipeng. Kelompok tarian tradisional ini dikembangkan oleh warga masyarakat terutama remaja pria dan wanita. Tarian tradisional ini ditampakan pada acara tertentu misalnya, pada acara pesta pernikahan, khitanan dan upacara adat tertentu.

e). *Kelompok olah raga*. Jenis olah raga yang dikembangkan adalah bola volley dan sepak bola. Meskipun kedua jenis olah raga tersebut telah terorganisasi dalam sebuah perkumpulan, namun demikian mereka masih menghadapi keterbatasan sarana prasarana. Sampai saat ini tempat/lapangan olah raga masih meminjam tanah/pekarangan milik penduduk.

f) *Kelompok Wanita Tani Seroja*. Kelompok ini khusus berada di Desa Boya Baliase, yang anggotanya kaum ibu-ibu petani. Kegiatan yang dilakukan oleh kelompok ini adalah menanam sayuran, bawang merah, menggiling kelapa, membuat minyak kelapa dan arisan kelompok. Jumlah anggota Kelompok Wanita Tani seroja ini sebanyak 10 orang. Kelompok ini dibentuk untuk meningkatkan perekonomian keluarga, dengan tetap menjaga kerukunan sosial.

2. Kepranataan dan Nilai-Nilai Sosial

Warga masyarakat di Kelurahan Poboya dan Boya Baliase adalah keturunan etnis Kaili (suku asli di Sulawesi Tengah). Warga masyarakat menggunakan bahasa Kaili, yaitu bahasa asli atau bahasa ibu dalam berkomunikasi dengan sesama warga asli. Meskipun demikian, pada umumnya mereka sudah bisa berbahasa Indonesia dengan lancar.

Warga masyarakat di kedua Desa pada umumnya penganut agama Islam. Simbol-simbol agama Islam dapat dilihat pada tempat-tempat ibadah (mesjid) yang mudah ditemukan, dan seni rebana yang merupakan salah satu seni bernafaskan Islam dikembangkan warga masyarakat. Namun demikian, apabila dilihat dari penampilan fisik (busana), maka warga masyarakat di kedua desa bukan penganut agama Islam yang fanatik. Masih sangat jarang kaum perempuan yang mengenakan kerudung (jilbab) sebagai ciri pakaian muslimah.

Meskipun warga masyarakat hidup dalam pola hidup yang sudah relatif maju, mereka masih memelihara tradisi dan upacara adat. Seperti *Novonja* (upacara panen padi), dan *Balia Jinja* (penanganan permasalahan sosial secara adat). Kemudian warga masyarakat memelihara nilai lokal, seperti gotong royong dan tolong menolong, saling menghormati dan toleransi terhadap warga masyarakat lain (pendatang) yang beda etnis maupun agama. Masyarakat mengembangkan pola hidup egaliter, tidak curiga terhadap orang yang baru dikenal dan mudah diajak berkomunikasi.

Disamping itu, kepercayaan dan kepatuhan terhadap pemimpin dan tokoh lokal masih sangat kuat. Hal ini yang berhasil

membangun ketahanan sosial masyarakat, sehingga masyarakat tidak mudah terpancing oleh peristiwa konflik di Poso yang membawa isu SARA.

C. Aktivitas dan Peran kapital Sosial

Dalam penelitian ini ketahanan sosial masyarakat dibatasi pada pemenuhan kebutuhan sosial dasar dan penanganan masalah sosial serta aktivitas sosial masyarakat lainnya.

1. Pemenuhan kebutuhan sosial dasar

Kebutuhan sosial dasar yang dimaksud adalah kebutuhan pangan, tempat tinggal, pendidikan anak dan kesehatan. Pemenuhan berbagai jenis kebutuhan sosial dasar masyarakat tersebut sangat terbantu dengan adanya keperangkatan, kepranataan dan nilai sosial pada masyarakat lokal.

Mekanisme yang digunakan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan adalah dengan membentuk kelompok tani. Mereka secara berkelompok menanam sayuran, bawang merah, menggiling kelapa, membuat minyak kelapa dan arisan kelompok. Kemudian masyarakat menghimpun dana sosial dari penarikan arisan yang digunakan untuk membantu pendidikan anak dari anggota yang tidak mampu dan bantuan perawatan bagi anggota yang sakit. Untuk pemenuhan tempat tinggal, masyarakat bergotong royong memberikan bahan bangunan dan tenaga.

Meskipun berbagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal tersebut belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan sosial dasar, namun kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapital sosial telah berperan dalam penguatan ketahanan sosial masyarakat.

2. Penanganan masalah sosial

Berbagai masalah sosial yang ada di Kelurahan Paboya dan Desa Bola Baliase, yaitu anak telantar, lanjut usia telantar, dan keluarga miskin. Namun demikian, masyarakat tidak mampu memberikan data kuantitatif ketiga jenis penyandang masalah sosial tersebut.

Walaupun tanpa data kuantitatif, terkait dengan peran kapital sosial dalam penanganan masalah sosial diperoleh informasi, bahwa ketiga jenis masalah sosial yang ada tersebut telah ditangani oleh masyarakat dengan mekanisme kelompok. Pada umumnya anggota kelompok memiliki dana sosial yang diperoleh dari jasa pinjaman dan penarikan arisan. Dana sosial tersebut kemudian dimanfaatkan untuk membantu anak terlantar (yatim/piatu/yatim piatu), lanjut usia telantar (jompo) dan keluarga miskin (keluarga tidak mampu). Disebabkan dana sosial yang tersedia masih sangat terbatas, maka bantuan diberikan secara insidental (dua kali setahun).

Meskipun berbagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal tersebut belum mampu menyelesaikan seluruh masalah sosial, namun kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapital sosial telah berperan dalam penguatan ketahanan sosial masyarakat.

3. Aktivitas sosial lainnya

Pada umumnya, setiap orang menjadi anggota lebih dari satu keperangkatan sosial. Hal ini memberikan nilai positif dalam kehidupan bermasyarkat, karena akan sangat mendukung terbangunnya sebuah hubungan sosial yang harmonis antar warga. Dengan terbangunnya hubungan sosial ini, maka konflik antar warga masyarakat dapat dihindarkan.

Pelembagaan nilai sosial, tercermin pada aktivitas masyarakat dalam kegiatan duka cita, suka cita maupun kegiatan lain sekitar kerumah tanggaan. Dalam peristiwa duka cita dan suka cita tersebut, warga masyarakat secara spontan terpanggil untuk memberikan bantuan sebagai bentuk solidaritas sosial, meskipun berbeda etinis, agama maupun status sosial ekonomi. Kesediaan komunitas Kristen memberikan bantuan terhadap komunitas Islam dalam kegiatan peringatan hari besar keagamaan, merupakan realitas terlembaganya nilai sosial lokal secara baik.

Sebagaimana diketahui, bahwa Palu merupakan kota yang rentan terjadi konflik, demikian juga khususnya pada Kelurahan Paboya dan Desa Bayo Baliase. Namun demikian, terbangunnya kerukunan antar kelompok masyarakat yang kuat, maka konflik terbuka belum pernah terjadi. Dalam hal ini peranan tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat besar, dimana masyarakat masih sangat menghormati dan mematui para tokoh tersebut.

IV. IMPLIKASI HASIL PENELITIAN

Kapital sosial merupakan konsep yang dewasa ini berkembang dalam diskusi dan studi pembangunan. Konsep ini dipopulerkan oleh Puttman dan Fukyama yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan masyarakat. Di Indonesia konsep yang aslinya *"social capital"* diterjemahkan oleh sebagian menjadi "modal sosial', dan sebagian yang lain menterjemahkan menjadi "kapital sosial". Meskipun ada perbedaan dalam penterjemahannya, namun kedua pihak memiliki pemahaman yang sama, bahwa *capital social* merupakan institusi, nilai dan jaringan-jaringan yang menjadi sumber bagi masyarakat lokal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Pelajaran yang dapat dipetik *(lesson learn)* dari hasil penelitian mengenai kapital sosial ini, bahwasanya di tingkat masyarakat akar rumput *(grassroots level)* terdapat kapital sosial. Kapital sosial ini menyebar pada semua komunitas, baik yang hidup secara tradisional (perdesaan) maupun yang sudah maju (perkotaan) sebagaimana ditemukan di Kelurahan Paboya dan Desa Boya Baliase di Sulawesi Tengah.

Dalam kehidupan sehari-hari, kapital sosial yang lebih dikenal dengan keperangkatan, keparanataan dan nilai sosial lokal, telah berperan dalam penguatan ketahanan sosial masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan sosial dasar, pemecahan masalah sosial dan memperkuat aktivitas/hubungan sosial antar kelompok masyarakat. Namun demikian, peran kapital sosial tersebut masih sangat terbatas *(localistic)*, apa yang dilakukan oleh keperangkatan sosial terbatas dimanfaatkan oleh anggotanya. Meskipun demikian, bagi warga masyarakat yang aktif menjadi beberapa anggota kelompok, mereka akan memperoleh banyak manfaat dari keperangkatan dimana mereka bergabung.

Keterbatasan pelaksanaan peran kapital sosial disebabkan mereka belum mampu mengembangkan hubungan secara kelembagaan. Akibatnya, sumber daya pada setiap kapital sosial hanya mampu menjangkau sasaran yang terbatas, baik kuantitas maupun kualitasnya. Padahal, apabila kapital sosial tersebut dapat diberdayakan dalam arti kuantitas dan kualitas kegiatannya dikembangkan, akan berperan lebih nyata dan bermakna dalam pembangunan masyarakat, khususnya dalam penguatan ketahanan sosial.

Sehubungan dengan itu, dalam rangka pembangunan masyarakat berbasis kapital sosial, Departemen Sosial bersama-sama dengan Dinas Sosial propinsi maupun kabupaten kota perlu melakukan pemetaan sosial untuk memperoleh profil kapital sosial (keperangkatan, kepranataan dan nilai sosial budaya). Dari pemetaan sosial tersebut dapat dihimpun data profil kapital sosial menurut sifat dan jenis kegiatannya, berdasarkan kategori wilayah perkotaan maupun perdesaan dan dinamikanya.

Pemetaan ini sangat penting untuk menghimpun data dasar tentang kapital sosial yang ada di seluruh wilayah tanah air, berdasarkan karaterisitik geografis maupun sosial budaya. Kita perlu mengetahui bagaimana profil kapital sosial di daerah pantai, di perkotaan, pada komunitas yang mayoritas agama tertentu, mayoritas etnis tertentu dan lain-lain. Data kapital sosial yang variatif ini akan sangat membantu dalam merancangkembangkan program pembangunan masyarakat di seluruh wilayah yang memiliki karakterisitik tertentu.

V. SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, diajukan beberapa saran yang perlu dipertimbangkan dalam rangka pembangunan masyarakat sebagai bagian dari program sosial, yaitu :

1. Pengembangan program pembangunan sosial yang berbasis kapital sosial. Selain basis-basis yang lain, seperti : panti, keluarga dan organisasi sosial, kapital sosial yang merupakan institusi-institusi sosial pada tingkat lokal merupakan basis alternatif yang perlu dikembangkan.
2. Penguatan kapital sosial. Kapital sosial lebih dikenal oleh masyarakat lokal sebagai keperangkatan, kepranataan dan nilai-nilai sosial perlu ada penguatan dari luar. Selama ini mereka melaksanakan kegiatan yang terbatas, baik jenis maupun jangkauannya disebabkan terbatasanya sumber daya yang dimiliki. Oleh sebab itu, kapital sosial tersebut perlu diberikan penguatan oleh pemerintah maupun LSM, terkait dengan kelembagaan maupun pelayanannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Alqagrie, Syarif Ibrahim. 1999. *"Konflik Etnis di Ambon dan Sambas ; Suatu Tinjauan Sosiologis". Indonesian Journal of Sosial and Cultural Antropology*. Jakarta : Fakultas Antropolgi Universitas Indonesia.

Fukuyama, Francis, 1999. *Sosial Capital and Civil Society*, Georgia : The Institute of Public Policy, George Mason University.

Hadiz, Vedi R. 1999. *Organisasi Kapital Masyarakat Madani dan Pembangunan di Asia Tenggara : Kasus Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Kartasasmita, Ginanjar, 1997. *Pembangunan untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dengan Pemerataan*, Jakarta : CIDES.

Kian Wie, Thee, 1981. *Pemerataan, Kemiskinan dan Ketimpangan : Beberapa Pemikiran tentang Pertumbuhan Ekonomi*, Jakarta : Sinar harapan.

Korten, David C. 1989, *Pembangunan Berpusat pada Rakyat*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Lawang, MZ Robert. 2005. *Kapital Sosial : Dalam Perspektif Sosiologik Suatu Pengantar*, Jakarta : UI-Press.

Moelyarto, T. 1995. *Politik Pembangunan : Sebuah Analisis, Konsep, Arah dan Strategi*, Yogyakrta : Tiara Wacana.

Muttaqin. et.all. 2005. *Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat : Implentasi Pemberdayaan Pranata Sosial*, Pusbang Tansosmas, Balatbang Sosial, Departemen Sosial.

Gidden, Anthony. 1999. *The Third Way (Jalan Ketiga)*, Jakarta : Gramedia.

Goler, Nicole van Rasvensburg. 2001, *"Meningkatkan Kondisi Kerangka Penghapusan Kemiskinan*, Peran Apakah yang Dapat Dilakukan oleh Organisasi Lokal?", dalam Izzeddin Bakhit (et.all), *Attacking the Roots of Poverty (Menggempur Akar-Akar Kemiskinan/* Freederik Ruma : penterjemah), Jakarta : YAKOMA – PGI.

Nuryana, Mu'man. 2003. *Pola Rekonsiliasi Masyarakat Antar etnis di Daerah Konflik di Indonesia*, Jakarta : Balatbang Sosial.

Soehartono, Irawan. 1997. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : Rineka Cipta.

Soetarso. 1991. *Praktek Pekerjaan Sosial dalam Pengembangan Masyarakat*, Bandung : KOPMA STKS.

Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta : Kanisius.

Supriyatna, Tjahya. 1997, *Birokrasi, Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*, Bandung : Humaniora Press.

Suradi (ed), 2004. *Profil Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat*, Jakarta : Direktorat Jenderal pemebrdayaan Sosial – Departemen Sosial.

———————— 2005. *Perubahan Sosial Budaya : Implikasinya terhadap Kebijakan Sosial dan Pelayanan Sosial bagi Anak, Keluarga dan Pengembangan Masyarakat*, Surabaya : Swastika Media Cipta.

Tjokroaminoto, Bintoro dan Mustopadipradja, 1988, *Kebijakan dan Administrasi Pembangunan : Perkembangan Teori dan Penerapan*, Jakarta : LP3ES.

Weaver, Jameson and Blue 1974 *"Growth With Equity : Can be Happy Together ; An Analysis of Seven Models and Britics"*, 1974, USA : United Nation.

LAIN-LAIN :

KOMPAS, *"Modal Sosial Tentukan Pertumbuhan"* Jakarta, 06 Mei 2003.

Markus, Sudibyo, *"Infrastruktur Sosial Masyarakat Tingkat Lokal sebagai Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat*, Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Program WKSBM, 25-27 September 2002", di Cipayung – Bogor.

Nuryana, Mu'man, *"Peran Lembaga Sosial Komunitas dalam Usaha Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Program WKSBM, 25-27 September 2002", di Cipayung – Bogor.

Podes Desa Boya Baliase, 2003.

Podes Kelurahan Paboya, 2003.

Putman, Robert . *What is Social Capital ?* //www.bowlingalone.com/sosialcapital.php3).

———————, 'Bowling Alone : *America's Declianing Social Capital"*, Journal of Democracy : 65-78, 1995.

Sudirman HN, *"Kesetaraan Jender, Modal Sosial dan Kesejahteraan Bersama"*,Jakarta : KOMPAS, 26 Agustus 2002.

Suradi, tanpa tahun. *Kemsikinan dan Politik Pembangunan Sosial* (dokumen pribadi).

Tata Mustasya, *"Kemiskinan, Modal Sosial, dan Kelembagaan"* Jakarta: KOMPAS, 20 Juni 2005.

WWW. Wikipedia.org/wiki/Sosial_capital - Enciclopeya.

BIODATA PENULIS:

Suradi, Ajun Peneliti Madya di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI.